



PCR KHUSUS WNI DI KBRI BEIJING

IDN/ANTARA

Kedutaan Besar RI di Beijing, Tiongkok, menggelar tes PCR khusus untuk warga negara Indonesia, Rabu (14/12), sebagai bentuk antisipasi dini atas munculnya wabah baru yang terjadi di tengah pelanggaran kebijakan antipandemi COVID-19. Sejumlah tempat tes PCR massal di Kota Beijing ditiadakan sejak otoritas setempat mencabut syarat wajib hasil tes negatif COVID-19 guna mengakses fasilitas umum.

PBB Blokir Junta Militer Myanmar Ambil Alih Kursi Keanggotaan

Keputusan ini menjadikan Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai duta besar Myanmar untuk PBB oleh pemerintah terpilih pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, akan terus memegang jabatan tersebut.

MYANMAR (IM) - Komite Tinggi PBB kembali memblokir junta militer Myanmar, yang merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu lewat kudeta Februari 2021, dalam upaya mengambil kursi negara itu di PBB. Hal itu disampaikan para diplomat dan kelompok hak asasi Myanmar. Komite kredensial Majelis Umum PBB menunda tindakan atas permintaan militer untuk mengambil alih kursi, ungkap dua diplomat yang berbicara dengan syarat anonim. Proyek Akuntabilitas Myanmar (MAP) mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa pihaknya juga mengetahui dari para diplomat

bahwa komite, yang mulai bertemu pada 29 November, telah menolak permintaan perwakilan para jenderal. Direktur MAP Chris Gunness mengatakan tindakan itu merupakan langkah penting yang memiliki signifikansi diplomatik dan simbolis yang besar, pada saat para pemimpin kudeta ilegal berusaha mendapatkan pengakuan internasional. Pengumuman resmi diharapkan dirilis pada Jumat (16/12). Keputusan tersebut menjadikan Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai duta besar Myanmar untuk PBB oleh pemerintah terpilih pemimpin sipil Aung

San Suu Kyi, akan terus memegang jabatan tersebut. Komite Kredensial PBB terdiri dari sembilan negara anggota termasuk Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat, dan bertemu dengan latar belakang meningkatnya ketegangan geopolitik atas perang di Ukraina, yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia yang semakin terisolasi dapat menghalangi setiap keputusan yang mendukung Kyaw Mo Tun. Militer, yang telah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Moskow, mendorong kandidatnya untuk mengambil alih dari Kyaw Moe Tun, yang didukung Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang didirikan oleh politisi Myanmar yang dicopot dari jabatannya di kantor para jenderal. Kudeta Februari 2021 MAP mengatakan PBB sekarang perlu memastikan Kyaw Moe Tun diberi "semua hak dan hak istimewa" yang berkaitan dengan statusnya sebagai

duta besar dan bahwa NUG mewakili negara di semua badan PBB. Ada ketidakkonsistenan yang mencolok, catat MAP, dengan NUG di Majelis Umum, perwakilan militer di Mahkamah Internasional di mana Myanmar menghadapi persidangan genosida atas perlakuannya terhadap sebagian besar Muslim Rohingya, dan kursi kosong di Dewan Kemanusiaan PBB. Dewan Hak. "Langkah terbaru ini harus membuka jalan untuk menyelesaikan anomali yang merampas kesempatan 55 juta orang di Myanmar untuk diwakili di PBB oleh pemerintah yang mereka pilih secara telak pada tahun 2020," kata Direktur Perlindungan MAP, Damian Lilly. Kyaw Moe Tun memilih tahun ini untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan menentang keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kudeta tersebut menjerumuskan Myanmar

ke dalam krisis ketika protes massa berkembang menjadi perlawanan bersenjata di tengah tindakan brutal militer terhadap mereka yang menentang pengambilalihannya. Sekitar 2.589 orang telah tewas sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan kelompok masyarakat sipil untuk Tahanan Politik, yang memantau situasi. Pada bulan Juli, militer menggantung empat aktivis dan politisi pro-demokrasi dalam penggunaan pertama hukuman mati di Myanmar sejak 1980-an. Aung San Suu Kyi ditangkap pada hari kudeta dan sejak itu menghadapi sejumlah persidangan di pengadilan militer tertutup. Dia telah dijatuhi hukuman dengan total sekitar 26 tahun penjara dan masih menghadapi lebih banyak tuduhan. Kyaw Moe Tun menjadi sasaran percobaan pembunuhan beberapa bulan setelah kudeta. AS menangkap dua warga Myanmar atas plot tersebut. ● **tom**

Uni Emirat Arab Lakukan Uji Coba Truk Tanpa Pengemudi

DUBAI (IM) - Dubai South menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Evocargo untuk peluncuran uji coba kendaraan otonom pertama UEA, untuk kargo di Distrik Logistik pengembangan utama. Truk tanpa pengemudi tersebut sejalan dengan upaya Dubai untuk menjadi pusat mobilitas pintar dunia. Tujuan utama dari uji coba ini adalah untuk memungkinkan Evocargo memodifikasi dan mendesain ulang EVO.1 khusus untuk wilayah MENA. Selama masa uji coba, operator jarak jauh akan ditempatkan di Pusat Kontrol untuk mengelola platform. Pusat tersebut, yang terletak di Distrik Logistik Dubai Selatan, mencakup rangkaian perangkat lunak untuk memantau pengoperasian EVO.1, memeriksa kemudahan servis sensor, dan mengidentifikasi kesalahan apa pun. CEO Distrik Logistik Dubai Selatan, Mohsen Ahmad, dan CEO Pendiiri, Evocargo, Andrey Bolshakov menghadiri upacara penandatanganan MoU. Dubai South adalah pengembangan utama kota tunggal terbesar di emirat yang berfokus pada pengembangan, logistik, dan real estat. Evocargo yang berkantor pusat di Dubai adalah penyedia layanan logistik yang mengembangkan dan menyediakan platform transportasi otonom logistik. Dubai adalah pusat logistik global dengan kapasitas pengiriman dan konektivitas yang tak tertandingi. Menyempurnakan teknologi truk listrik dan tanpa pengemudi untuk kawasan ini akan membantunya mengurangi jejak karbon lebih lanjut dan memperkuat kredensial hijau kota ini. Tidak seperti inisiatif kota dan negara lain yang hanya berfokus pada memungkinkan kendaraan pribadi tanpa pengemudi, Strategi Transportasi Tanpa Pengemudi Dubai bersifat multimoda dan mencakup penargetan ketujuh moda armada transportasi umum, termasuk metro, trem, bus, taksi, transportasi laut, kereta gantung dan antar-jemput. Ketika diterapkan sepenuhnya, strategi ini akan membantu mengurangi biaya transportasi sebesar 44 persen atau 900 juta dirham emirat (Rp 3,83 triliun) menghemat 1,5 miliar dirham emirat (Rp 6,4 miliar) melalui pengurangan pencemaran lingkungan dan 18 miliar dirham

emirat (Rp 76,5 melalui peningkatan efisiensi sektor transportasi sebesar 20 persen. "Kami sangat dapat membuat perjanjian strategis dengan Evocargo untuk meluncurkan uji coba otonom pertama UEA, menetapkan tolak ukur global baru dan mengkonsolidasikan status kepemimpinan sektor logistik negara," kata Mohsen Ahmad dilansir dari Gulf Today, Kamis (15/12). "Selain meningkatkan efisiensi operasional, kemiripan kami akan membantu meningkatkan operasi rantai pasokan dan mencapai keberlanjutan. Di Distrik Logistik, kami diberi mandat untuk mendukung industri dan mempercepat sektor logistik UEA yang berkembang pesat," sambungnya. Andrey Bolshakov berujar, ini adalah usaha pertama Evocargo ke kendaraan otonom dalam platform logistik multimoda global. "Uji coba ini merupakan tonggak penting bagi perusahaan karena membuka peluang untuk memperluas produk kami di pasar Timur Tengah dan Asia yang strategis," kata Bolshakov. Kapasitas angkat platform tanpa pengemudi adalah 2 ton, dan dapat menampung hingga enam palet EUR yang bergerak dengan kecepatan 25 km per jam hingga sejauh 200 km. Mengisi daya kendaraan untuk pengoperasian sehari penuh membutuhkan waktu 40 menit hingga enam jam, tergantung stopkontaknya. Sistem keamanan platform EVO.1 memiliki empat tingkatan: visi komputer ruang di sekitar kendaraan, sistem diagnostik otomatis, sistem berhenti jarak jauh, dan sistem pengereman pneumatik siaga. Manajemen armada yang efektif dari sistem pilot otomatis EVO.1 meningkatkan efisiensi transportasi kargo sekaligus mengurangi waktu henti truk secara signifikan. Robotisasi dan penggunaan listrik dan sel bahan bakar hidrogen sebagai pengganti bahan bakar konvensional menawarkan efisiensi biaya. Evocargo memiliki 37 penemuan dan teknologi yang dilindungi. Paten Evocargo mencakup algoritme untuk pemosisian visual, pemetaan otomatis, kalibrasi dan integrasi sensor dan kamera, metode untuk memilih kecepatan keselamatan, dan parameter untuk model dinamis. ● **gul**

Peru Tetapkan Status Darurat Nasional

LIMA (IM) - Menteri Pertahanan Peru Boluarte Alberto Otarola mengumumkan keadaan darurat nasional pada Rabu (14/12). Status tersebut memungkinkan tentara untuk membantu polisi dalam menjaga keselamatan publik setelah seminggu protes berapi-api dan blokade jalan. "Kami telah sepakat untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri, karena tindakan vandalisme dan kekerasan," kata Otarola. Otarola menegaskan, kondisi saat ini di Peru membutuhkan tanggapan yang kuat dari pemerintah. Keputusan tersebut pun diakui akan berupa pelanggaran kebebasan terenteng, termasuk hak untuk berkumpul, berada di rumah, dan kebebasan transit. Protes dipicu oleh pengulangan mantan Presiden Pedro Castillo pada 7 Desember dalam pemungutan suara pemakzulan. Tokoh seorang sayap kiri yang terpilih pada 2021 ditangkap setelah secara ilegal mencoba membubarkan Kongres yang terbaru dari serangkaian krisis politik yang dihadapi produsen tembaga terbesar kedua di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Mantan wakil presiden Castillo Dina Boluarte dilantik setelah pemecatannya. Jika mengatakan pada Rabu (14/12), ingin mengganjar 18 bu-

lan penahanan praperadilan untuk Castillo yang telah didakwa dengan pemberontakan dan konspirasi. Mahkamah Agung Peru bertemu untuk mempertimbangkan permintaan tersebut tetapi kemudian menangguhkan sesi tersebut. Pergolakan politik telah memicu kemarahan dan terkadang protes keras di seluruh negara Andean, terutama di daerah pedesaan dan pertambangan. Sebanyak enam orang, kebanyakan remaja, meninggal dalam bentrokan dengan polisi. Semuanya menjadi korban tembakan, menurut kelompok HAM. Para pengunjuk rasa memblokir jalan raya, membakar gedung-gedung, dan menyerbu bandara. Boluarte telah menyerukan perdamaian dan mengatakan tidak dapat berdialog jika ada kekerasan terus berlanjut. Dia mengatakan, pemilu dapat dimajukan ke Desember 2023 dari April 2024, tanggal yang dijanjikan sebelumnya. Pemungutan suara saat ini dijadwalkan pada 2026 ketika masa jabatan Castillo akan berakhir. Sejak penangkapan, Castillo ditahan di fasilitas kepolisian DIROES di Lima. Dia meminta para pendukung untuk datang ke penjara, dengan mengatakan dia harus dibebaskan setelah periode tujuh hari awal penahanan praperadilan berakhir pada Rabu (14/12).

"Saya menunggu Anda semua di fasilitas DIROES untuk bergabung dengan Anda dalam pelepasan," kata Castillo dalam pesan tulisan tangan yang diposting di Twitter, ditandatangani sebagai "Presiden Konstitusional Peru. Castillo membantah tuduhan pemberontakan dan konspirasi. Castillo juga meminta Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika untuk menengahi atas namanya, karena puluhan pendukung berkumpul di penjara menuntut dia dibebaskan. Namun, sumber dari kantor kejaksaan dan analis mengatakan, Castillo tidak bisa dibebaskan selama Mahkamah Agung menyelesaikan permintaan jaksas. Pengadilan Peru mengatakan di Twitter, bahwa pihaknya akan mengadakan sidang pada Jumat (16/12). "Permintaan penahanan praperadilan selama 18 bulan terhadap mantan presiden Pedro Castillo dan (mantan Perdana Menteri) Anibal Torres, yang diselidiki atas kejahatan pemberontakan dan lainnya," ujarnya. Castillo mendapat dukungan dari sesama pemimpin kiri regional. Salah satu yang keras bersuara termasuk Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador yang mengkritik pemecatannya sebagai tidak demokratis. ● **ans**



SUVENIR MENARA EIFFEL DI PARIS

Tampak sejumlah warga membeli souvenir patung Menara Eiffel di Montmartre setelah salju turun di Paris, Prancis, Rabu (14/12).

PBB Keluarkan Iran dari Badan Hak-hak Perempuan

NEW YORK (IM) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk mengeluarkan Iran dari badan hak-hak perempuan. Hal itu tidak terlepas dari aksi brutal Iran terhadap protes yang dipimpin perempuan. Menyusul kampanye yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), 29 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memilih untuk mengeluarkan republik Islam itu dari Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW) untuk sisa masa jabatan 2022-2026. Delapan negara memberikan suara menentang dan 16 abstain. Diperlukan mayoritas sederhana untuk mengadopsi langkah tersebut, yang telah diusulkan oleh Amerika Serikat. Resolusi tersebut mengatakan bahwa Iran mencabut keanggotaan komisi tersebut dengan segera.

"Kepemimpinan Iran terus melemahkan dan semakin menindas hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, seringkali dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan," bunyi resolusi tersebut seperti dikutip dari France 24, Kamis (15/12). Resolusi itu menambahkan bahwa pemerintah Iran melakukannya dengan menjalankan kebijakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan dan mandat komisi serta melalui penggunaan kekuatan mematenkan yang mengakibatkan kematian para pengunjung rasa

damai, termasuk perempuan dan anak perempuan. Komisi tersebut adalah badan antar pemerintah global utama yang didedikasikan khusus untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada awal November, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengeluarkan Iran dari komisi tersebut. Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga mengkampanyekan hal yang sama. Para penentang, termasuk Rusia dan Tiongkok, mencatat bahwa Iran telah terpilih menjadi anggota badan itu dan mengeluarkannya akan menjadi preseden yang berbahaya. Negara-negara di komisi perempuan dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yang anggotanya dipilih oleh Majelis Umum. Iran telah dicengkeram oleh demonstrasi sejak kematian Masha Amini di dalam tahanan pada 16 September. Perempuan muda Kurdi Iran itu meninggal setelah ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian untuk wanita yang ketat di negara itu. Pihak berwenang sejak itu telah melakukan ribuan penangkapan dalam tindakan keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai kerusuhan. Pengadilan Iran mengatakan telah menjatuhkan 11 hukuman mati sehubungan dengan protes tersebut. Iran menuduh Washington menekan negara-negara menjelang pemungutan suara. ● **gul**

Iran Vonis Pekerja Kemanusiaan Belgia 28 Tahun Penjara

TEHERAN (IM) - Iran vonis pekerja kemanusiaan Belgia, Olivier Vandecasteele dengan hukuman 28 tahun penjara, karena terlibat dengan sejumlah kejahatan. Menteri Kehakiman Belgia, Vincent Van Quickenborne, pada Rabu (14/12) mengatakan, pemerintah melakukan segala upaya untuk menjamin pembebasannya. Quickenborne mengatakan, Vandecasteele telah dijatuhi hukuman sebagai pembalasan atas hukuman penjara yang dijatuhkan Belgia pada seorang diplomat Iran tahun setelah kudeta. AS menangkap dua warga Myanmar atas plot tersebut. ● **tom**

Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi Belgia meneguhkan kesepakatan antara Iran dan Belgia yang memungkinkan pertukaran tahanan antara kedua negara. Tetapi Van Quickenborne mengatakan perjanjian itu secara hukum masih relevan untuk Vandecasteele. Kesepakatan itu dinilai oleh keluarga Vandecasteele sebagai satu-satunya harapan. Media Belgia melaporkan bahwa Vandecasteele kemungkinan ditukar dengan Assadolah Assadi, seorang warga Iran yang tahun lalu dinyatakan bersalah atas percobaan terorisme dan dijatuhi hukuman 28 tahun penjara di Belgia. Assadi berencana melakukan pemboman di rapat umum Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) pada 2018. NCRI adalah kelompok perlawanan yang berbasis di Prancis. Namun rencana itu berhasil digagalkan. Van Quickenborne mengatakan situasi Vandecasteele terkait langsung dengan hukuman Assadi, yang bekerja sebagai diplomat di kedutaan Iran di Wina, Austria. Sementara jaksas mengatakan jabatan Assadi adalah kedok untuk melakukan tindakan terhadap anggota oposisi Iran di Eropa. Iran menolak semua tuduhan terorisme dan menyebut tuduhan serangan Paris sebagai aksi "bendera palsu" oleh NCRI, yang dianggapnya sebagai kelompok teroris. ● **ans**

Dalang Kudeta Jerman Berencana Bunuh Kanselir Olaf Scholz

BERLIN (IM) - Persiapan kudeta, yang digagalkan polisi Jerman pekan lalu, telah merencanakan pembunuhan terhadap Kanselir Olaf Scholz, demikian dilaporkan New York Times (NYT). Menyusul penggerebekan besar-besaran di berbagai daerah di seluruh negeri pekan lalu, olisi Jerman membongkar persiapan kudeta oleh apa yang disebut sebagai "Citizens of the Reich". Dalam penggerebekan itu diketahui kelompok itu telah menimbun senjata api dan berencana menyerbu parlemen. Dalam artikelnya pada Selasa, (13/12) NYT, mengutip tiga pejabat yang "mengetahui penyelidikan", mengklaim bahwa dokumen yang ditemukan di tempat milik para konspirator menunjukkan bahwa kelompok tersebut bermaksud untuk membunuh Kanselir Olaf Scholz. Di antara surat-surat yang disita dilaporkan lebih dari 100 perjanjian kerahasiaan yang bersumpah kepada para penandatangan untuk merahasiakan rencana-rencana ini di bawah hukuman mati. Menurut sumber NYT, penggerebekan itu menemukan dan menyita 40 senjata api dan pihak berwenang menduga bahwa lebih banyak senjata mungkin disembunyikan di tempat persembunyian. Selain itu, tersangka utama,

Heinrich XIII, Pangeran Reuss, yang akan mengambil alih kendali di Jerman jika kudeta berhasil, konon mencoba menjalin hubungan dengan konsulat Rusia di kota Leipzig. Pria itu dikatakan telah bertemu dengan diplomat Rusia setidaknya dua kali. Namun, seperti yang ditunjukkan surat kabar itu, para penyidik belum menemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa Moskow menanggapi tawaran tersebut. Seorang warga negara Rusia bernama Vitalia B. juga termasuk di antara para tersangka, demikian dilansir RT. Dalam komentar tentang kasus sebelumnya, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah terlibat dengan komplotan, menggambarkan dugaan konspirasi sebagai urusan domestik Jerman. Di antara para tersangka terdapat dua anggota saat ini dan satu mantan anggota partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman, klaim artikel itu. Inti dari jaringan diduga terdiri dari apa yang disebut Reichsbuerger ("Citizens of the Reich"), yang percaya bahwa negara Jerman setelah Perang Dunia II bukanlah negara berdaulat. Dua puluh tiga tersangka anggota komplotan saat ini ditahan, dengan 31 lainnya sedang diselidiki, NYT melaporkan. ● **gul**